

Pelaksanaan Smart UMKM melalui Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar

A. Adawiyah Hanif Shahsanani¹, Aiman Sabar Rezeky²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Email: adawiyahaniff@gmail.com^{*}, aiman.sabar.rezeky@unm.ac.id

(* : coresponding author)

Abstrak-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, namun menghadapi tantangan besar di era digital, yang menuntut implementasi konsep *Smart* UMKM untuk meningkatkan daya saing. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar memiliki peran krusial dalam memfasilitasi transformasi ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dalam mewujudkan *Smart* UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi penelitian yang komprehensif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan yang dipilih secara purposif, yaitu Tim Pengembang Kewirausahaan dan beberapa pelaku UMKM. Analisis data dilakukan mengikuti langkah Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi/Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar mencakup pembinaan yang berfokus pada pengembangan kualitas produk melalui Inkubator *Center*, termasuk standarisasi dan pelatihan digital. Pengoordinasian dilakukan melalui strategi komunikasi berlapis (media sosial dan enumerator di kelurahan) serta kolaborasi antar sektor. Namun, terungkap bahwa sosialisasi dan jangkauan program pembinaan serta Inkubator *Center* masih belum merata, dibuktikan dengan banyaknya pelaku UMKM yang tidak mengetahui atau belum menerima pelatihan. Program dan strategi pengawasan (*monitoring* dan evaluasi) juga dirancang untuk mendukung pelaksanaan *Smart* UMKM. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan signifikan antara rencana pengawasan dan implementasi di lapangan, sebab banyak pelaku UMKM tidak merasakan kehadiran atau pemantauan langsung. Selain itu, pelaku UMKM cenderung menyelesaikan masalah secara mandiri, mengindikasikan bahwa mekanisme pelaporan dan peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar sebagai sumber bantuan langsung belum dimanfaatkan secara efektif.

Kata Kunci: *Smart* UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM, Pelaku UMKM, Inkubator *Center*, Kota Makassar

Abstract-Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of Indonesia's economy, but they face major challenges in the digital era, which requires the implementation of the *Smart* MSME concept to increase competitiveness. The Makassar City Cooperative and MSME Office has a crucial role in facilitating this transformation. This study aims to analyse the implementation of the role of the Cooperative and MSME Agency in realising *Smart* MSMEs. This study uses a qualitative approach to obtain comprehensive research information. Data was collected through observation and direct interviews with informants selected purposively, namely the Entrepreneurship Development Team and several MSME actors. Data analysis was conducted following the steps of Data Condensation, Data Presentation, and Verification/Conclusion Drawing. The results of the study show that the role of the Makassar City Cooperative and MSME Office includes guidance focused on product quality development through the Incubator Centre, including standardisation and digital training. Coordination is carried out through a layered communication strategy (social media and enumerators in the sub-districts) and inter-sectoral collaboration. However, it was revealed that the dissemination and reach of the guidance programme and the Incubator Centre are still uneven, as evidenced by the large number of MSME actors who are unaware of or have not received training. Programmes and monitoring and evaluation strategies were also designed to support the implementation of *Smart* MSMEs. However, there was a significant gap between the monitoring plan and its implementation in the field, as many MSME actors did not feel that there was any direct presence or monitoring. In addition, MSME actors tended to resolve problems independently, indicating that the reporting mechanism and the role of the Makassar City Cooperative and MSME Office as a source of direct assistance had not been utilised effectively.

Keywords: *Smart* MSMEs, Cooperative and MSME Agency, MSME Actors, Incubator Centre, Makassar City

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, dan sampai saat ini jumlah UMKM mencapai lebih dari 64 juta unit usaha (Limanseto, 2025). Kota Makassar, sebagai salah satu pusat ekonomi utama di kawasan timur Indonesia, memiliki populasi UMKM yang besar dan beragam. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat bergantung pada pertumbuhan dan daya saing UMKM-nya.

Era Revolusi Industri 4.0 menuntut UMKM untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi digital. Transformasi ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Tantangan utama yang dihadapi UMKM di Makassar, seperti di daerah lain, meliputi: Pertama, banyaknya UMKM yang masih tradisional dalam hal pemasaran, pencatatan keuangan, dan manajemen operasional. Kedua, rendahnya pasar yang lebih luas di luar jangkauan fisik. Serta, ketiga, masih banyak pelaku UMKM yang kurang paham dan terampil dalam menggunakan platform digital, *e-commerce*, dan media sosial. Untuk mengatasi tantangan ini, muncul konsep *Smart* UMKM yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sektor UMKM..

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar tentunya dihadapkan pada tantangan yang tidak kecil. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran dan tanggung jawab besar terhadap pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan UMKM di Kota Makassar, sebagaimana telah diatur dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahun ke depan, Dinas Koperasi dan UMKM perlu memperkuat program pembinaan dan pengembangannya agar lebih adaptif terhadap perkembangan era teknologi informasi yang semakin canggih, terutama dalam rangka mendukung pelaksanaan program *Smart* UMKM. Dalam era transformasi digital yang sedang berlangsung, implementasi konsep *Smart* UMKM memiliki peran penting. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat gap antara kebutuhan mendesak akan transformasi digital (*Smart* UMKM) dan kenyataan pelaksanaan program serta peran konkret Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dalam mewujudkan transformasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar melaksanakan peranannya dalam melaksanakan konsep *Smart* UMKM.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fokus penelitian. Metode kualitatif dipilih untuk menggali informasi mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti (Moleong, 2017). Data utama diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposif, yang berarti mereka dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa mereka telah memahami masalah yang menjadi fokus penelitian (Bungin, 2017). Dalam konteks ini, peneliti telah menetapkan informan dari Tim Pengembang Kewirausahaan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dan beberapa informan pelaku UMKM.

Sebagai data pendukung, penulis juga mencantumkan bahan pustaka yang terkait dengan masalah dan konteks penelitian dengan merujuk pada sumber-sumber yang relevan, seperti artikel ilmiah, buku, dokumen, dan publikasi elektronik lainnya yang sesuai dengan fokus penelitian (Haryoko, dkk., 2020). Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam Saleh (2023), yaitu: (1) Kondensasi Data; data yang diperoleh akan dirangkum dan dipilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian agar hasil penelitian lebih mudah diungkapkan. (2) Penyajian Data; data diorganisasikan dan disusun dalam pola hubungan agar mudah dipahami. (3) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan; yakni hasil dari semua rangkaian proses penelitian untuk mendapatkan temuan baru.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pasal

4 ayat 2 poin e, disebutkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

3.1 Pembinaan

Pembinaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan, khususnya memberikan kesempatan kepada wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kehadiran Dinas Koperasi dan UMKM bertujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi rakyat sehingga mampu bersaing dalam bidang jasa maupun perdagangan. Pemerintah melakukan upaya pembinaan agar dapat memberdayakan UMKM melalui bimbingan, pendampingan, pemberian fasilitas, dan bantuan untuk menumbuhkan kemampuan daya saing (Florita, *et al.*, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari Dinas Koperasi dan UMKM dalam hal pembinaan adalah dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk. Dimulai dari identifikasi produk pelaku UMKM melalui program Inkubator *Center*. Identifikasi produk melalui Inkubator *Center* ini akan mengacu pada hasil identifikasi kebutuhan masing-masing produk. Diantaranya yaitu, (1) Standarisasi dan Legalitas, (2) Pemberian fasilitas desain kemasan, (3) Perizinan, & (4) Sertifikasi dan kompetensi bagi pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar aspek pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dilakukan untuk memastikan bahwa produk-produk UMKM tidak hanya memiliki kualitas yang baik, tetapi juga memenuhi kriteria dan persyaratan yang diakui guna mendorong pertumbuhan UMKM. Selain itu, berbagai bentuk pelatihan atau pengembangan keterampilan juga dilakukan secara komprehensif untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku *smart* UMKM, mencakup: (1) Pengembangan keterampilan teknis berupa pelatihan praktis dan berorientasi pada produk, seperti pelatihan pembuatan abon, merajut, pembuatan roti, dan pengolahan makanan. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan keterampilan langsung yang dapat diaplikasikan oleh pelaku UMKM untuk menghasilkan produk yang lebih beragam dan berkualitas; dan (2) Peningkatan kapasitas berupa pelatihan penggunaan teknologi tepat guna, pelatihan digitalisasi pemasaran dan digitalisasi usaha, serta pelatihan manajemen usaha. Pelatihan ini membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan dan alat untuk bersaing di era digital agar mereka mampu mengelola usaha mereka secara efektif, memanfaatkan teknologi untuk efisiensi, dan memperluas jangkauan pasar melalui platform digital. Namun, meskipun telah ada upaya pembinaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang mengaku tidak mengetahui atau belum menerima pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa jangkauan dan sosialisasi program pembinaan masih perlu ditingkatkan agar lebih merata dan dapat diakses oleh semua pelaku UMKM.



Gambar 1. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar Gelar Pelatihan Pembuatan Roti bagi UMKM. Sumber: Website Media Sulsel (2023)

3.2 Pengoordinasian

Pengoordinasian UMKM adalah aspek krusial untuk memastikan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan optimal. Nursolih *et al* (2024) mengemukakan bahwa semakin ditingkatkan proses koordinasi dalam aktivitas UMKM, maka kinerja UMKM khususnya pada karyawan akan semakin meningkat pula. Dua pilar utama dalam pengkoordinasian ini adalah mekanisme komunikasi dan penyebaran informasi serta kolaborasi antar sektor. Mekanisme komunikasi dan penyebaran informasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terkait, seperti: pelaku UMKM, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga keuangan, akademisi, swasta, dan masyarakat umum memiliki akses ke informasi yang akurat dan relevan. Sedangkan kolaborasi antar sektor dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan, program, dan alokasi anggaran agar tidak tumpang tindih dan lebih efektif dalam menjangkau UMKM di berbagai wilayah.

Terkait mekanisme komunikasi dan penyebaran informasi tentang program *smart* UMKM kepada masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar menerapkan mekanisme komunikasi dan penyebaran informasi yang proaktif untuk program-program *smart* UMKM dengan mengadopsi strategi komunikasi yang berlapis. Pertama, melalui media sosial (*Facebook, Instagram, & TikTok*) untuk menjangkau khalayak yang luas, terutama bagi UMKM yang melek teknologi atau dikelola generasi muda. Kedua, memanfaatkan sosialisasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk menjangkau pelaku UMKM yang nyaman dengan pemberian informasi secara tatap muka. Serta ketiga, melakukan monitoring dan mendatangi langsung pelaku UMKM melalui peran enumerator di setiap kelurahan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik masing-masing UMKM. Terdapat sekitar 153 enumerator se-Kota Makassar yang ditugaskan untuk mendata pelaku UMKM di masing-masing kelurahan. Hasil dari data inilah yang kemudian menjadi basis *database* dalam pemberian program dan pelatihan berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisa sesuai dengan kebutuhannya.



Gambar 2. Kegiatan Monitoring & Evaluasi oleh Tim Enumerator UMKM Kota Makassar.
Sumber: Website Klikkiri.co (2024)

Tabel 1. Bentuk-bentuk Kolaborasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dengan lembaga-lembaga Kolaborator

No	Bentuk Kegiatan (Bulan & Tahun Pelaksanaan)	Lembaga Kolaborator
1	Pameran produk UMKM di Indonesia <i>City Expo</i> (Mei 2025)	TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah)

2	Expo Ramadhan (Maret 2025)	Perbankan
3	Expo Produk UMKM dan Kolaborasi <i>Technopreneur</i> (Oktober 2023)	Perusahaan Teknologi berbasis <i>E- Commerce/Marketplace</i>
4	<i>Eksposure</i> UMKM (Mei 2023)	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar

Sumber: Analisis Pribadi (2025)

Tabel 1 diatas menyajikan gambaran mengenai bentuk-bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dengan berbagai lembaga kolaborator dalam upaya pengembangan UMKM. Kolaborasi ini direalisasikan melalui serangkaian kegiatan pameran dan eksposur yang diselenggarakan pada rentang waktu Oktober 2023 hingga Mei 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar menerapkan strategi kolaborasi yang beragam dan adaptif, menyasar berbagai aspek pengembangan UMKM mulai dari promosi produk, akses permodalan, digitalisasi, hingga peningkatan visibilitas, dengan melibatkan mitra yang sesuai dengan kebutuhan spesifik di setiap kegiatan. Hanya saja, hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun upaya pengoordinasian sudah dilakukan, pelaku UMKM masih menunjukkan keterbatasan pengetahuan mengenai program *smart* UMKM. Beberapa pelaku mengaku tidak mengetahui detail program dan tidak menerima informasi yang cukup, yang menunjukkan bahwa sosialisasi dan jangkauan program masih perlu ditingkatkan.

3.3 Pengelolaan

Pengelolaan *smart* UMKM adalah tentang bagaimana UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat di tengah persaingan yang ketat dan perubahan yang cepat agar UMKM menjadi lebih inovatif dan berdaya saing tinggi di pasar global. UMKM harus terus menerapkan manajemen inovasi agar bisa bertahan dan terus berkembang (Fatimah *et al.*, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar memiliki program-program *smart* UMKM yang berpusat pada pemberdayaan dan pengembangan UMKM, dengan Inkubator *Center* sebagai wadah utama untuk meningkatkan kualitas usaha pelaku UMKM. Poin penting dari Inkubator *Center* adalah kemampuannya untuk membantu menyelesaikan "apapun permasalahan" yang dihadapi pelaku UMKM. Ini menandakan bahwa Inkubator *Center* berfungsi sebagai pusat solusi satu pintu, menangani berbagai tantangan yang mungkin dihadapi UMKM, mulai dari aspek produksi, pemasaran, keuangan, hingga manajemen. Inkubator *Center* diberdayakan oleh tenaga ahli yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya masing-masing.

Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa keberadaan Inkubator *Center* UMKM, yang diklaim sebagai wadah utama peningkatan kualitas usaha oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, belum sepenuhnya dikenal atau dipahami fungsinya secara memadai oleh sebagian pelaku UMKM. Dengan kata lain, konsep dan manfaat Inkubator *Center* belum tersosialisasi dengan efektif hingga ke seluruh level pelaku UMKM. Hal ini diperjelas dengan realitas di lapangan yang menggambarkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara apa yang ditawarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dan apa yang diketahui oleh pelaku UMKM. Walaupun demikian, melalui program Inkubator *Center* tersebut, beberapa UMKM dapat tergabung sebagai bagian dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar sebagaimana terlampir pada tabel 2.

Tabel 2. Sebaran UMKM Kota Makassar Berdasarkan Bidang Usaha beserta Jumlahnya

No	Jenis UMKM	Jumlah UMKM
1	Agribisnis	404

2	ATK & Percetakan	203
3	Campuran/Kelontong	13.784
4	Fashion	2.947
5	Jasa	2.212
6	Kecantikan	660
7	Kontraktor	30
8	Otomotif	806
9	Pedagang Kaki Lima	572
10	Pendidikan	35
11	Produk Kreatif	679
12	Teknologi Internet	259
13	Kuliner	9.749
14	Telekomunikasi	356
15	Tour & Travel	43
Jumlah		32.739

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar (2025)

3.4 Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan Pengawasan *smart* UMKM adalah serangkaian proses sistematis dan terintegrasi yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dan strategis UMKM berjalan sesuai dengan perencanaan Pemerintah. Pengawasan terhadap kemitraan UMKM dimaksudkan untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran persaingan usaha (Albab, *et al.*, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengendalian dan pengawasan program Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar bertumpu pada mekanisme monitoring dan evaluasi pasca-pelaksanaan program secara langsung dan menyeluruh. Artinya setelah pelaku UMKM menerima manfaat dari program pembinaan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar secara otomatis akan melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasilnya guna mengukur pencapaian UMKM dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program yang telah dilaksanakan.

Terkait kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, temuan dari penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara strategi pengawasan yang direncanakan Dinas Koperasi dan UMKM dengan implementasi di lapangan. Meskipun Dinas menyatakan melakukan monitoring dan evaluasi langsung, pada faktanya masih banyak pelaku UMKM, baik yang konvensional maupun digital, belum merasakan adanya kehadiran atau pemantauan tersebut. Dengan kata lain, strategi monitoring dan evaluasi belum terealisasi secara efektif di lapangan, khususnya dalam menjangkau pelaku UMKM secara langsung.

Selain monitoring dan evaluasi, terdapat pula metode pelaporan dari masyarakat atau pelaku UMKM sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pelaporan bagi masyarakat atau pelaku UMKM di Kota Makassar bervariasi

tergantung pada jenis program yang diikuti. Pelaporan tidak selalu harus dalam bentuk dokumen formal, tetapi dapat berupa indikator keberhasilan seperti peningkatan omset, kelengkapan legalitas, serta standar produk yang telah dipenuhi. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaporan dan penekanan pada hasil nyata dari program yang diikuti.

Hanya saja, fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM cenderung menyelesaikan masalah usaha mereka secara mandiri atau mencari solusi di luar Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, serta tidak memiliki kesadaran atau pengalaman dalam melaporkan masalah kepada Dinas terkait. Mekanisme pelaporan masalah dari pelaku UMKM ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar juga belum diketahui atau dimanfaatkan secara efektif. Sehingga fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar sebagai tempat pelaporan atau sumber bantuan langsung ketika UMKM menghadapi masalah belum sepenuhnya terwujud di mata sebagian pelaku usaha.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan *smart* UMUM, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas produk dan kapasitas SDM pelaku UMKM melalui berbagai program dan pelatihan. Fokus utama pembinaan adalah pada identifikasi kebutuhan produk dan penyediaan fasilitas yang mendukung, seperti standarisasi, desain kemasan, dan pelatihan keterampilan teknis. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang mengaku tidak mengetahui atau belum menerima pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar juga telah merancang strategi pengawasan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Namun, masih terdapat kesenjangan antara rencana pengawasan dan implementasinya di lapangan. Banyak pelaku UMKM yang tidak merasakan kehadiran atau pemantauan dari Dinas, baik dalam bentuk monitoring langsung maupun evaluasi terkait program yang ada. Selain itu, meskipun ada metode pelaporan yang dirancang untuk mengawasi dan mengendalikan UMKM, pelaku usaha cenderung menyelesaikan masalah mereka secara mandiri tanpa melapor kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan yang ada belum dimanfaatkan secara efektif, dan pelaku UMKM tidak memiliki kesadaran atau pengetahuan yang cukup tentang cara melaporkan masalah tersebut.

REFERENCES

- Albab, S. U., Widayanto, E., & Sibarani, K. B. (2023). Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(1), 74-86. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.98>.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Fatimah, F., Tyas, W. M., Widyabakti, M. A., & Ma'rifah, N. (2020). Manajemen Inovasi Bernafaskan Islam melalui Analisis SWOT pada UMKM Kuliner. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 57-64. <https://doi.org/10.32528/jmbi.v6i1.3534>.
- Florita, A., Jumiati, J., & Mubarak, A. (2019). Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 143 - 153. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i1.11>.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Limanseto, H. (2025). *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. Available at: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>, diakses tanggal 20 Mei 2025.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nursolih, E., Rustendi, E., & Lisara, A. (2024). Pengaruh Koordinasi dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan (Studi Perusahaan UMKM Se-Kota Banjar). *Jurnal Industrial Galuh*, 6(1), 17–24. <https://doi.org/10.25157/jig.v6i1.3809>
- Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Penerbit AGMA.